

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Jepang pada zaman sekarang (Heisei) merupakan salah satu negara yang berkembang dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari majunya Jepang baik dalam ilmu dan teknologi, ekonomi maupun sumber daya manusianya. Kemajuan Jepang ini diperoleh sejak era modern, tepatnya pada zaman Meiji. Zaman Meiji adalah zaman di mana Jepang mulai memodernkan negaranya dengan mempelajari berbagai hal dari negara Barat. Jepang belajar dari Barat karena pada waktu itu Jepang menganggap negara Barat sudah modern.

Sebelum zaman Meiji, Jepang merupakan negara yang sangat tertinggal kemajuannya jika dibandingkan dengan negara-negara Barat. Disebut tertinggal karena dari 1192 sampai 1867, Jepang merupakan sebuah negara yang *feodalis*, di mana dalam masyarakatnya terdapat stratifikasi sosial yang ketat yang dikenal dengan *Shinokosho* yang terdiri dari *Shi (bushi)* atau *samurai*, *No (nomin)* atau petani, *Ko (kosakunin)* atau pengrajin dan *Sho (shonin)* atau pedagang. Dalam hal ini *bushi* atau *samurai* merupakan kasta teratas dan *shonin* atau pedagang adalah kasta terbawah. Hal ini membuat masyarakat Jepang berpikir bahwa hanya kelas teratas (*Samurai*) yang berhak merasa memiliki Jepang dan membelanya ketika bahaya terjadi. Ini karena selama 200 tahun lebih (1639-1854) Jepang belum pernah mengadakan kontak dengan negara lain. Jepang tidak mengadakan kontak dengan negara lain karena pada masa itu berlaku kebijakan Politik *Sakoku*.

*Sakoku* merupakan kebijakan politik yang mengatur bahwa orang asing dilarang masuk ke Jepang dan orang Jepang dilarang berhubungan dengan orang asing ataupun meninggalkan Jepang dengan ancaman hukuman mati bagi yang melanggarnya. Kebijakan yang berlangsung sejak 1639–1854 tersebut ditetapkan ketika Keshogunan Tokugawa berada di bawah pimpinan Tokugawa Iemitsu. Kebijakan ini bukan tanpa sebab, tetapi ada beberapa hal yang menjadi alasannya, di antaranya karena masuknya agama Kristen dan kekhawatiran akan adanya *Imperialisme* di Jepang.

Dalam kebijakan Politik *Sakoku*, Jepang bahkan melihat dunia luar atau setidaknya-didaknya dunia Eropa melalui tabir permusuhan dan kecurigaan, hal ini disebabkan oleh pengalaman bangsa ini ketika berinteraksi dengan *Ordo Jesuit* yang dinilai sebagai dalang atas pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Nagasaki dan penyerangan atas biara dan Kuil *Shinto* serta lapisan masyarakat bawah agar melanggar hukum kasta Jepang kala itu. Peristiwa ini dikenal juga dengan nama Pemberontakan Shimabara yang terjadi pada 1637-1638 di Nagasaki (Paris, 2011: 25).

Sebagaimana dijelaskan di atas, selain karena pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Nagasaki dan penyerangan atas biara dan Kuil *Shinto* serta provokasi terhadap lapisan masyarakat bawah agar melanggar hukum kasta Jepang kala itu, adanya kebijakan Politik *Sakoku* juga dikarenakan kekhawatiran akan *Imperialisme*, yaitu kebijakan di mana sebuah negara besar dapat memegang kendali daerah atau negara lain agar bisa dijajah (<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Imperialisme>).

Kekhawatiran Jepang terhadap *Imperialisme* disebabkan adanya misi pelayaran Eropa terutama Portugis ke Jepang, di mana misinya adalah *Gold, Gospel, Glory* atau mencari kekayaan, penyebaran agama dan mencari kejayaan di Jepang. Jepang pada masa itu berpikir, adalah hal yang tidak mungkin ketika proses penyebaran Kristen di Jepang tidak diikuti dengan tujuan-tujuan *Imperialisme*. Sejak itu, *Imperialisme* menjadi permasalahan bagi Jepang. Dikhawatirkan jika *Imperialisme* masuk ke Jepang, maka Jepang akan sangat cepat dikuasai. Apalagi pada saat itu masyarakat Jepang sangat terikat dalam sistem *feodalisme* yaitu sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan atau tuan tanah dan kurang mempunyai rasa memiliki akan tanah air Jepang.

Ketika Politik *Sakoku* dijalankan, aktifitas pertanian, perdagangan dan praktik kebudayaan lokal setempat mengalami peningkatan pesat. Selain itu, pemerintah mempunyai kesempatan yang besar untuk memperbaiki pola pikir masyarakat. Dapat dikatakan bahwa masa *Sakoku* adalah masa Jepang banyak belajar memahamai bangsanya sendiri dan bangsa lain.

Sebenarnya selama Jepang menjalankan Politik *Sakoku*, hubungan antara Jepang dengan negara-negara luar, tidak putus sama sekali karena Jepang masih berinteraksi dengan beberapa negara. Hal ini karena penyebab dari terjadinya masa *Sakoku* adalah adanya penyebaran agama Kristen, maka Jepang masih memberikan tenggang rasa terhadap negara-negara luar yang melakukan hubungan dengan Jepang tanpa membawa-bawa penyebaran agama Kristen. Namun demikian, interaksi dengan negara Barat lebih sering dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui hubungan dagang dengan pedagang Belanda dan penyebaran informasi lewat buku-buku Barat yang masuk ke Jepang.

Belanda adalah satu-satunya bangsa Eropa yang diizinkan berdagang dengan Jepang, tetapi kantor dagangnya hanya diizinkan berada di wilayah pinggir, tepatnya di Pulau Desima Prefektur Nagasaki. Selain itu, meskipun Belanda mendapatkan izin untuk memasuki wilayah Jepang, tetapi pemerintah Jepang melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap keberadaan Belanda. Bangsa Belanda tidak diizinkan sama sekali untuk keluar dari wilayah Desima meski ada beberapa saat di mana Belanda dapat pergi ke wilayah Jepang lainnya, yaitu ketika pemerintah Jepang memberlakukan kebijakan di mana dalam satu tahun sekali Belanda harus melakukan kunjungan ke pusat pemerintahan Jepang tempat *shogun* (penguasa Jepang pada waktu tersebut) berada.

Melalui Pulau Desima, ternyata pemerintahan Jepang juga memaksa kapal-kapal V.O.C (perusahaan dagang milik Belanda) yang singgah di Pulau tersebut untuk memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi. Kapal-kapal tersebut kebanyakan berlayar dari Eropa menuju Batavia (sekarang bernama Jakarta). Dengan memperoleh informasi dari Belanda, Jepang tidak akan tertinggal jika terjadi perkembangan ilmu pengetahuan yang berada di Eropa. Begitupun sebaliknya, ketika kapal V.O.C tersebut berangkat dari Batavia ke Eropa, maka kapal tersebut biasanya terlebih dahulu singgah di Pulau Desima. Kemudian ketika singgah di Pulau tersebut, awak kapalnya wajib memberikan segala informasi yang ia ketahui, sehingga dengan cara ini pemerintahan Jepang tidak akan ketinggalan informasi baik dari Eropa maupun Asia Tenggara. Kebijakan pemerintah Jepang yang hanya mengizinkan Belanda untuk tinggal di

Dezima tanpa masuk wilayah Jepang, membuat masyarakat lebih objektif dalam menerima ilmu–ilmu dari Belanda tersebut.

Selanjutnya Politik *Sakoku*, membawa dampak bagi negara Jepang, di antaranya dapat mencegah Jepang dari perang-perang besar. Politik *Sakoku* selama lebih dari 200 tahun ini ternyata telah berhasil membangun Jepang dengan identitas masyarakat *feodal* yang kuat sebagai identitas masyarakat Jepang. Selain itu, hal ini telah membawa kebudayaan Jepang mengalami proses kematangan serta menghasilkan kondisi yang kondusif untuk membangun nasionalisme bangsa Jepang. Masyarakat Jepang yang dulunya awam akan nasionalisme berkembang menjadi masyarakat Jepang yang terlalu membanggakan negaranya sendiri.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian bagaimana pengaruh dari Politik *Sakoku* tersebut terhadap rasa nasionalisme bangsa Jepang dan bagaimana dampak dari rasa nasionalisme tersebut.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Politik *Sakoku* dilatarbelakangi oleh penolakan pemerintah Jepang terhadap masuknya agama Kristen ke Jepang dan kekhawatiran adanya *Imperialisme* terhadap Jepang.
2. Politik *Sakoku* berdampak pada ketertinggalan Jepang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa Barat.
3. Politik *Sakoku* berpengaruh pada pembangunan nasionalisme masyarakat Jepang.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh Politik *Sakoku* di Jepang terhadap rasa nasionalisme bangsa Jepang dan dampak rasa nasionalisme bangsa Jepang sebagai pengaruh diberlakukannya Politik *Sakoku*.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Politik *Sakoku* terhadap nasionalisme masyarakat Jepang?
2. Bagaimana dampak rasa nasionalisme masyarakat Jepang sebagai pengaruh dari diberlakukannya Politik *Sakoku*?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh Politik *Sakoku* terhadap nasionalisme masyarakat Jepang.
2. Dampak rasa nasionalisme masyarakat Jepang sebagai pengaruh dari diberlakukannya Politik *Sakoku*.

#### F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi penulis dapat menambah pengetahuan tentang sejarah khususnya sejarah tentang Politik *Sakoku* dan pengaruhnya terhadap nasionalisme bangsa Jepang juga dampak dari rasa nasionalisme bangsa Jepang. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca atau menjadi referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan tema ini. Bagi Universitas Darma Persada manfaat penelitian dapat memperkaya koleksi perpustakaan, sehingga dapat membantu mahasiswa dalam mencari referensi penelitian.

#### G. Landasan Teori

##### 1. Pengaruh

Menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (2003 : 731), pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang berkuasa atau berkekuatan.

Menurut Badudu Zain, „Pengaruh“ adalah : “Daya menyebabkan sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu

yang lain dengan kata lain pengaruh merupakan penyebab sesuatu terjadi atau dapat mengubah sesuatu hal ke dalam bentuk yang kita inginkan.

## 2. Politik

Kata Politik berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani, yang dapat berarti kota atau negara kota. Selanjutnya, kata Politik di dalam masyarakat kita telah dipakai dalam banyak arti. Dua arti dari kata Politik yang terpenting, ialah :

a. Politik dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk pada atau mengenai satu dari segi kehidupan manusia bersama dalam masyarakat, yaitu segi kehidupan Politik manusia, segi kehidupan bermasyarakat yang menyangkut hubungan kekuasaan, menyangkut *power relationship*. Dalam artian ini terkandung isi Politik sebagai usaha untuk memperoleh kekuasaan, memperbesar atau memperluas serta mempertahankan kekuasaan.

b. Politik di dalam arti yang dipergunakan untuk menunjuk kepada satu rangkaian tujuan yang hendak dicapai, atau cara-cara atau arah kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan, atau dengan kata yang lebih singkat kebijaksanaan (Ranjabar, 2016).

Pengertian dasar dari kata Politik itu sendiri adalah : Bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat Politik dengan kata lain Politik adalah bahasan dan Renungan atas :

- 1.) Tujuan dari kebijakan Politik
- 2.) Cara-cara mencapai tujuan itu
- 3.) Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu
- 4.) Kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Sebagai upaya untuk mencapai dan memelihara identitas nasional yang kuat pemerintah suatu negara akan berupaya melakukan berbagai cara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuatnya agar tercipta dan tercapai dari apa yang menjadi tujuan dan sasaran pemerintah tersebut. Dengan demikian

kebijakan luar negeri suatu negara akan berpengaruh terhadap yang menjadi kepentingan dan sasaran yang ingin dituju oleh pemerintah untuk mencapai kepentingan dalam negerinya (Budiardjo, 2008).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa politik adalah cara-cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah di suatu negara.

### 3. *Sakoku*

*Sakoku* (鎖国 harfiah: negara terkunci/negara terrantai.) adalah kebijakan luar negeri Jepang, yang mengatur bahwa orang asing yang tidak diizinkan memasuki Jepang maupun warga Jepang tidak diizinkan meninggalkan Jepang, dengan ancaman hukuman mati (Beasley, 1999).

*Sakoku* adalah kebijakan dari pemerintahan *Bakufu* Tokugawa. Pada zaman Tokugawa, awalnya Ieyasu sebagai *Shogun* memperbolehkan orang Jepang pergi ke luar negeri dan mengizinkan perdagangan bagi kapal-kapal yang memiliki surat izin dari *bakufu*, namun Ieyasu berfikir bahwa hal ini berbahaya karena melihat adanya pengaruh agama Kristen yang luas. Akhirnya Ieyasu melarang agama Kristen untuk disebarkan. Pada 1639 *bakufu* melarang datangnya orang-orang Portugis ke Jepang dan hanya kepada orang Belanda yang tidak mempunyai hubungan dengan agama Kristen yang diizinkan melakukan perdagangan dan lalu lintas dengan luar negeri. Ini disebut *Sakoku* (Politik Sakoku negeri) yang berlangsung dari 1639 sampai 1854. Karena Politik Sakoku, Jepang tersakoku dari peradaban Barat tetapi industri dan kebudayaan khas Jepang mengalami perkembangan selama lebih dari 200 tahun mengadakan *Sakoku* (Ishii, 1989).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa *Sakoku* adalah kebijakan pemerintah bakufu pada zaman Bakufu Tokugawa yang melarang datangnya orang-orang Barat ke Jepang dan hanya kepada orang

Belanda yang tidak mempunyai hubungan dengan agama Kristen yang diizinkan melakukan perdagangan dan lalu lintas dengan luar negeri sejak 1639 sampai 1854.

#### 4. Nasionalisme

Sebuah negara yang maju dan merdeka tidak terlepas dari peran masyarakatnya terutama dalam hal rasa nasionalisme yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Nasionalisme merupakan sesuatu yang harus ditanamkan sejak dini kepada masyarakat agar mereka dapat mencintai bangsanya. Nasionalisme berasal dari kata *nation* (bangsa) yang merupakan suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan (Kohn, 1984).

Menurut Hitler dalam Chotib dan Djazuli (2007:24) “nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain”. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah paham kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu terhadap bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme dalam arti luas mengandung prinsip-prinsip yaitu kebersamaan, persatuan, dan kesatuan serta demokrasi/demokratis.

Dalam konsep nasionalisme terdapat hal yang jelas yaitu adanya identitas nasional yang dimiliki oleh orang yang menjadi bagian di dalamnya identitas memberikan peran penting dalam tercapainya tujuan dari suatu negara. Artinya dengan adanya identitas nasional, kita dapat lebih mudah menyampaikan atau berbagi pandangan terhadap orang lain yang ada dalam suatu kelompok nasional. Tidak ada negara yang dapat bertahan hidup bersaing di arena internasional tanpa promosi rasa identitas nasional dan tujuan dalam negeri (Halliday, 1997).

Nasionalisme memberikan dukungan dan dorongan kepada suatu negara untuk mencapai tujuannya dalam menjalin hubungan internasional. Sebuah negara yang maju dan merdeka tidak terlepas dari peran masyarakatnya terutama dalam hal rasa nasionalisme yang dimiliki oleh setiap masyarakatnya. Nasionalisme merupakan sesuatu yang harus ditanamkan



sejak dini kepada masyarakat agar mereka dapat mencintai bangsanya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa nasionalisme adalah sikap dan semangat berkorban untuk melawan bangsa lain serta memberikan peran penting dalam tercapainya tujuan dari suatu negara.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan metode kepustakaan. Data diperoleh dari buku-buku, artikel, bacaan lain yang berhubungan dengan Politik *Sakoku*.

#### **I. Sistematika Penulisan**

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

— Bab II, merupakan pemaparan tentang sejarah Politik *Sakoku*.

Bab III, merupakan pembahasan tentang pengaruh Politik *Sakoku* di Jepang terhadap nasionalisme masyarakat Jepang.

Bab IV, kesimpulan.